

## ARTIKEL

# Inovasi Manajemen Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

Penguatan Ekosistem Digital untuk Akselerasi Ekonomi Daerah pada Era Digital

## *Management Innovation in Local Government Transaction Electronification (ETPD)*

*Strengthening the Digital Ecosystem for Regional Economic Acceleration in the Digital Era*

Elsa Natalia Sinulingga

Direktorat Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

✉ [ndekaro2022@gmail.com](mailto:ndekaro2022@gmail.com)



### OPEN ACCESS

Sitasi: Sinulingga, E. N. (2025). Inovasi Manajemen Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD): Penguatan Ekosistem Digital untuk Akselerasi Ekonomi Daerah pada Era Digital. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 9(1), 17–28. <https://doi.org/10.21787/mp.9.1.2025.17-28>

Dikirim: 23 April 2025

Diterima: 2 Mei 2025

Diterbitkan: 30 Mei 2025

© Penulis



Artikel ini dilisensikan di bawah lisensi [Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

**Kata Kunci:** Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; Inovasi Manajemen; Ekonomi Digital; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Transformasi Digital.

**Abstrak:** Transformasi digital dalam tata kelola keuangan pemerintahan daerah telah menjadi agenda strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bagian dari Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) merupakan instrumen penting untuk memperkuat ekonomi digital di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis model inovasi manajemen ETPD dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi ETPD, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi implementasi ETPD. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan dan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi dokumentasi, analisis data sekunder, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa model inovasi manajemen ETPD yang efektif terdiri dari empat pilar: penguatan regulasi dan koordinasi antarlembaga, penguatan ekosistem digital pemerintah, pengembangan infrastruktur digital, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Implementasi ETPD telah menunjukkan tren positif dengan 87,9% pemerintah daerah berada pada level Digital pada Semester I Tahun 2024. Namun, masih terdapat kesenjangan antarwilayah dengan Jawa-Bali mencatat capaian tertinggi (66,5%) dan Nusampua terendah (27,1%). Efektivitas implementasi ETPD dipengaruhi oleh delapan faktor: kepemimpinan dan komitmen politik, regulasi dan payung hukum, kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas SDM, kemitraan dengan perbankan, literasi digital masyarakat, koordinasi antarlembaga, dan insentif fiskal. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan untuk memperkuat kemitraan antarlembaga, mengembangkan Roadmap ETPD yang komprehensif, memprioritaskan pengembangan infrastruktur digital di daerah 3T, meningkatkan literasi digital, menetapkan pedoman implementasi teknis, mengembangkan sistem pembayaran digital terintegrasi, dan menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif. Berdasarkan rekomendasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inovasi manajemen ETPD berperan strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital pemerintahan daerah.

**Abstract:** Digital transformation in local government financial management has become a strategic agenda to realize transparent, accountable, and efficient governance. Local

*Government Transaction Electronification (ETPD) as part of the Acceleration and Expansion of Regional Digitalization (P2DD) is a crucial instrument for strengthening the digital economy at the regional level. This research aims to analyze the ETPD management innovation model in strengthening the digital economic ecosystem, identify factors influencing the effectiveness of ETPD implementation, and formulate policy recommendations for optimizing ETPD implementation. Employing a qualitative approach with policy analysis and case study methods, this research collected data through documentation studies, secondary data analysis, in-depth interviews, and observations. The analysis results indicate that an effective ETPD management innovation model consists of four pillars: strengthening regulation and inter-institutional coordination, reinforcing the government digital ecosystem, developing digital infrastructure, and enhancing public digital literacy. ETPD implementation has shown a positive trend with 87.9% of local governments at the Digital level in Semester I of 2024. However, regional disparities persist with Java-Bali recording the highest achievement (66.5%) and Nusampua the lowest (27.1%). The effectiveness of ETPD implementation is influenced by eight factors: leadership and political commitment, regulatory framework, technological infrastructure readiness, human resource capacity, banking partnerships, public digital literacy, inter-institutional coordination, and fiscal incentives. Based on these findings, it is recommended to strengthen inter-institutional partnerships, develop a comprehensive ETPD Roadmap, prioritize digital infrastructure development in frontier regions, enhance digital literacy, establish technical implementation guidelines, develop an integrated digital payment system, and implement an effective monitoring and evaluation system. implications are for Indonesia to immediately implement Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, establish a centralized data protection authority, and encourage Public-Private Partnerships to improve accountability in personal data protection. Based on these recommendations, it can be concluded that ETPD innovation plays a strategic role in strengthening the digital economic ecosystem of regional governments.*

**Keywords:** Local Government Transaction Electronification; Management Innovation; Digital Economy; Local Taxes and Levies; Digital Transformation.

## 1. Pendahuluan

Transformasi digital dalam tata kelola (*management*) keuangan pemerintahan telah menjadi agenda strategis dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, kredibel, dan efisien. Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, salah satu inisiatif transformasi digital yang signifikan adalah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Program ini merupakan bagian integral dari kebijakan nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Pada tahun 2024, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,22%, dengan proyeksi peningkatan pada tahun 2025 menjadi 5,29%-5,61% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024). Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tersebut adalah digitalisasi dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) yang menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah dalam mengembangkan mesin ekonomi baru. Dalam konteks inilah, ETPD menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi digital di tingkat daerah.

Data menunjukkan bahwa implementasi ETPD telah mengalami peningkatan signifikan. Hasil asesmen Indeks ETPD pada Semester I Tahun 2024 menunjukkan bahwa 87,9% atau 480 pemerintah daerah (pemda) berada dalam level Digital, melampaui target Satgas P2DD tahun 2024 sebesar 85% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024). Capaian ini juga berkorelasi positif dengan peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang merupakan salah satu indikator keberhasilan implementasi ETPD. Meskipun terjadi peningkatan

signifikan dalam implementasi ETPD, masih terdapat kesenjangan antarwilayah. Wilayah Jawa-Bali mencatat capaian ETPD tertinggi dengan 66,5% pada level digital, sementara wilayah Nusampua (Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) hanya mencapai 27,1% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024). Kondisi ini menggambarkan perlunya inovasi manajemen dalam implementasi ETPD untuk meminimalkan kesenjangan digital antarwilayah.

Inovasi manajemen dalam hal ini merujuk pada penerapan praktik, proses, maupun pendekatan baru dalam pengelolaan organisasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan adaptabilitas terhadap perubahan, khususnya transformasi digital. Birkinshaw dkk. (2008) mendefinisikan manajemen inovasi sebagai penemuan dan penerapan praktik atau teknik manajerial baru yang belum umum digunakan, yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam kerangka implementasi ETPD, inovasi manajemen mencakup penguatan koordinasi antar perangkat daerah, digitalisasi prosedur transaksi keuangan, integrasi sistem informasi, serta optimalisasi peran ekosistem digital.

Selain itu, implementasi ETPD juga dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran PKB masih rendah, di mana dari 110,87 juta kendaraan bermotor, hanya 46,28 juta (36,99%) yang tercatat lunas, dan 53,23 juta (47,38%) kendaraan *outstanding* (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024). Kondisi ini menyiratkan adanya potensi pendapatan daerah yang belum tergarap dan menjadi tantangan dalam implementasi ETPD. Inovasi manajemen dalam implementasi ETPD menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dan memperkuat ekosistem digital pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, studi tentang inovasi manajemen ETPD menjadi relevan untuk mengidentifikasi model dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi ETPD di daerah. Karya tulis ini bertujuan untuk, Menganalisis model inovasi manajemen ETPD dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital pemerintahan daerah di Indonesia, Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi ETPD dalam konteks hubungan keuangan pusat-daerah, dan Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan implementasi ETPD sebagai instrumen penguatan ekonomi digital pemerintahan daerah.

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) telah menjadi kepedulian Bersama dan fokus kajian dalam berbagai penelitian terkait transformasi digital pemerintahan. Ananda (2022) mendefinisikan ETPD sebagai proses transformasi transaksi keuangan pemda dari berbasis tunai menjadi non-tunai, dengan memanfaatkan teknologi digital. Transformasi ini mencakup aspek penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah. Artha (2021) lebih lanjut menjelaskan bahwa ETPD merupakan bentuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola keuangan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam studinya di Provinsi Lampung, Zahra (2024) menunjukkan bahwa implementasi ETPD memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana ETPD berperan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang berdampak pada peningkatan PAD. Selaras dengan itu, Pardede (2022) yang menganalisis implementasi ETPD di Kota Pekanbaru, menemukan bahwa implementasi ETPD berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks yang lebih luas, Aringga (2023) menganalisis transformasi pemerintahan digital melalui penerapan ETPD, khususnya dalam penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam pemungutan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) di Kota Jambi. Studi ini menemukan bahwa adopsi QRIS sebagai metode pembayaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempermudah proses pembayaran pajak. Temuan ini memperkuat argumen bahwa inovasi teknologi dalam ETPD dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.

Ditinjau dari perspektif manajemen perubahan, Aminah dan Saksono (2021) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Mereka menyoroti pentingnya kepemimpinan, budaya organisasi, dan kapasitas sumber daya manusia dalam mendorong transformasi digital. Di era digital ini, inovasi manajemen menjadi keniscayaan. Sebagaimana studi Saksono (2018), inovasi manajemen merupakan pembaruan terhadap norma, standar, prosedur, kriteria, dan birokrasi (NSPKB), terutama dalam implementasi kebijakan dan tata Kelola organisasi dalam upaya peningkatan kinerjanya. Urgensi inovasi manajemen ditegaskan pula dalam serangkaian studi Saksono (2020, 2023, 2024) yang menandakan pentingnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, termasuk konsep “*innovation-hub (I-Hub)*” dan “*dodeca-helix*” yang menekankan kolaborasi *multi-stakeholder* dalam mengembangkan ekosistem inovasi demi peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, terutama sektor keuangan daerah.

Dari sisi regulasi, implementasi ETPD didukung oleh berbagai kebijakan nasional, termasuk Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD). Amalia dkk. (2025) menganalisis kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak daerah dikaitkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, dan menemukan bahwa regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks internasional, Nukpezah dkk. (2022) melakukan penelitian tentang kontribusi teknologi *smart cities* terhadap kinerja pendapatan di pemerintah lokal di Amerika Serikat. Penelitian ini menemukan bahwa adopsi teknologi *smart cities*, termasuk sistem pembayaran digital, memiliki korelasi positif dengan peningkatan pendapatan pemerintah lokal. Barinova dan Zemtsov (2020) juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam mendukung pertumbuhan inklusif dan keberlanjutan regional di Rusia. Dari hal tersebut masalah yang dihadapi yaitu, Bagaimana model inovasi manajemen ETPD dapat mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital pemerintahan daerah di era digital dan Faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitas implementasi ETPD dalam konteks hubungan keuangan pusat-daerah.

Terkait dengan inovasi manajemen dalam konteks ETPD, beberapa studi kasus di Indonesia menunjukkan hasil yang positif. Fahrinda dkk. (2024) meneliti strategi implementasi ETPD pada penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Tangerang, dan menemukan bahwa pendekatan inovatif dalam implementasi ETPD dapat meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi. Damayanti (2024) melakukan evaluasi program ETPD di Solo Raya dan menemukan bahwa peningkatan Indeks ETPD berkorelasi dengan peningkatan PAD. Di sisi lain, Sudrajat dan Kristian (2022) serta Fadhillah dan Herawati (2023) menganalisis implementasi aplikasi e-retribusi di pasar daerah dan menemukan bahwa aplikasi tersebut dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan retribusi pasar. Penelitian-penelitian ini memperkuat argumen bahwa inovasi daerah dalam implementasi ETPD dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Dari perspektif ekonomi digital, [Bowo \(2022\)](#) menganalisis peran *e-commerce* dan strategi promosi dalam pengembangan UMKM di era digital. Ekosistem digital yang kuat, termasuk sistem pembayaran digital, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital di daerah. Senada dengan itu, [Prianto dkk. \(2021\)](#) membahas optimalisasi UMKM dengan metode *self-approach* untuk mengentaskan keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, dan menekankan pentingnya digitalisasi dalam mendukung keberlanjutan UMKM.

Dalam aspek teknologi informasi, [Saifuddin \(2020\)](#) menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan PAD. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan temuan [Sherenita dan Huseno \(2024\)](#) yang menganalisis efektivitas pelaksanaan penerimaan pajak daerah berbasis non-tunai di Kota Tarakan. Dari sisi perbankan, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bank yang mengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) juga menjadi fokus penelitiannya, [Alya dkk. \(2024\)](#) menganalisis peran digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, dan menemukan bahwa kolaborasi antara Pemda dan BPD merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa penelitian juga menyoroti aspek perilaku pengguna dalam adopsi teknologi digital. [Aisyah dan Nurohman \(2023\)](#), [Astuti dan Arifin \(2023\)](#) serta [Chasanah dan Muharrami \(2023\)](#) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan *e-wallet* atau dompet digital. Rangkaian studi ini menemukan bahwa kemudahan penggunaan, kemanfaatan, dan keamanan merupakan faktor penting yang memengaruhi adopsi teknologi pembayaran digital. Temuan ini relevan dalam konteks ETPD, di mana adopsi teknologi oleh masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi ETPD. Dari tinjauan literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa ETPD merupakan instrumen penting dalam transformasi digital Pemda. Inovasi manajemen dalam implementasi ETPD semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong peningkatan PAD. Namun, keberhasilan implementasi ETPD juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepemimpinan, budaya organisasi, kapasitas SDM, regulasi, dan infrastruktur teknologi. Studi ini mengembangkan konsep inovasi manajemen ETPD dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan konteks spesifik hubungan keuangan pusat-daerah di Indonesia.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan (*policy analysis*) yang dikombinasikan dengan studi kasus (*case study*) ([Saksono, 2019](#)). Metode analisis kebijakan digunakan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan ETPD dalam kerangka hubungan keuangan pusat-daerah. Studi kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam praktik inovasi manajemen ETPD di daerah-daerah terpilih.

Studi Dokumentasi yang dianalisis mencakup UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda PDRD), Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang ETPD, dan laporan Indeks ETPD, serta dokumen program unggulan ETPD di daerah, termasuk data sekunder tentang realisasi PDRD dan capaian Indeks ETPD yang tersedia dalam Sistem Informasi P2DD (SIP2DD). Analisis Data Sekunder menggunakan capaian indeks ETPD. Dengan menggunakan Wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan yaitu para pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kemenko

Perekonomian, pejabat Pemda yang bertanggung jawab atas implementasi ETPD, dan perwakilan BPD. Observasi mencakup pengamatan implementasi program ETPD di daerah-daerah terpilih beserta infrastruktur teknologi yang digunakan, proses transaksi elektronik, dan interaksi antara masyarakat dengan sistem ETPD. Tujuannya memperoleh pemahaman kontekstual tentang implementasi ETPD di lapangan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Perkembangan Implementasi ETPD di Indonesia

Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Mengacu data dari [Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia \(2024\)](#), jumlah Pemda yang berada dalam level Digital dalam IETPD (Indeks ETPD) terus meningkat, dari 115 Pemda (Semester I-2021) menjadi 480 Pemda (Semester I-2024). Peningkatan ini menunjukkan komitmen Pemda dalam mengadopsi transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, meskipun terjadi peningkatan secara nasional, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antarwilayah. Wilayah Jawa-Bali mencatat capaian tertinggi dengan 66,5% pemerintah daerah berada pada level Digital, sementara wilayah Nusampua (Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) hanya mencapai 27,1%. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemerataan implementasi ETPD di seluruh wilayah Indonesia.

Dari segi partisipasi dalam Championships TP2DD (Tim Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah), tercatat peningkatan jumlah Pemda yang berpartisipasi, dari 479 Pemda (88,4%) pada 2022 menjadi 512 Pemda (93,7%) pada 2024. Partisipasi tertinggi dicatat oleh wilayah Jawa-Bali dan Kalimantan yang mencapai 100%, sementara wilayah Nusampua mencatat partisipasi terendah dengan 71,4%.

Selain itu ETPD juga mendorong transformasi signifikan pada aspek belanja daerah yang semakin terdigitalisasi. Proses pengadaan barang dan jasa juga pembayaran kepada pihak ketiga sudah beralih ke sistem nontunai yang terintegrasi dengan kanal digital pemerintah daerah. Digitalisasi ini tentunya tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengeluaran daerah, namun juga memperluas partisipasi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan pemerintah.

#### 3.2. Studi Kasus Program Unggulan ETPD

Penyajian studi kasus program unggulan ETPD yang diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia merupakan pendekatan inovatif dalam manajemen transaksi digital pada sistem keuangan Pemda, dengan penekanan khusus pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Setiap kasus menggambarkan strategi implementasi yang berbeda dan dampak terukurnya terhadap peningkatan pendapatan daerah dan pengembangan ekosistem digital sebagaimana disajikan pada [Tabel 1](#).

**Tabel 1.** Studi Kasus Program Unggulan ETPD

Program Unggulan	Ulasan
Program Jateng Gayeng	<p>Program Jateng Gayeng merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dalam mengimplementasikan ETPD, khususnya dalam pemungutan PKB. Program ini memperkuat aplikasi Samsat Budiman dengan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra dalam rangka pembayaran PKB.</p> <p>Hasil implementasi program menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan objek PKB dan penerimaan daerah. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan objek PKB sebesar 22.063 unit dibandingkan tahun 2022. Dari segi penerimaan, PKB Jateng mencatat peningkatan dari Rp5.432.507.032.000,00 (2022) menjadi Rp5.509.901.272.575 (2023), menunjukkan kenaikan sebesar Rp77.394.240.575 atau 1,4%.</p> <p>Keberhasilan Program Jateng Gayeng dapat diatribusikan pada inovasi manajemen yang mengintegrasikan teknologi digital dengan jaringan masyarakat melalui BUMDes. Pendekatan ini berhasil mengatasi kendala geografis dan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan perbankan, sehingga memungkinkan masyarakat di daerah pedesaan untuk melakukan pembayaran PKB secara elektronik.</p>

Program Unggulan	Ulasan
Samsat Digital Jawa Barat (SDJB)	SDJB merupakan inovasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam mengimplementasikan ETPD untuk pemungutan PKB yang menawarkan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran PKB melalui aplikasi digital, tanpa harus datang ke kantor Samsat.  Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna SDJB terus meningkat, dari 655.447 pengguna (2020) menjadi 744.695 pengguna (2023) atau meningkat 13,62%. Dari segi penerimaan, terjadi peningkatan yang signifikan dari Rp547 miliar (2020) menjadi Rp745 miliar (2023) atau meningkat 8,76%.  Inovasi manajemen dalam SDJB terletak pada pengembangan sistem yang <i>user-friendly</i> dan terintegrasi dengan berbagai kanal pembayaran digital. Pendekatan ini berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memudahkan proses pembayaran PKB.
Aplikasi SIGNAL (Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Nasional)	Pada tingkat nasional, Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas POLRI) mengembangkan aplikasi SIGNAL sebagai bagian dari upaya digitalisasi pemungutan PKB. Aplikasi ini menawarkan kemudahan layanan transaksi digital pada pembayaran PKB.  Data menunjukkan bahwa sejak peluncurannya (2021), jumlah pendaftar akun SIGNAL meningkat hingga enam kali lipat, dari 0,22 juta (2021) menjadi 1,38 juta (2024). Jumlah transaksi pembayaran melalui SIGNAL juga meningkat signifikan, dari 66.923 (2021) menjadi 574.615 transaksi (2024). Rasio pembayaran terhadap kendaraan terdaftar juga meningkat dari 37,99% (2021) menjadi 63,63% (2024).  Keberhasilan aplikasi SIGNAL dapat diatribusikan pada inovasi manajemen yang menggabungkan kemudahan akses, keamanan transaksi, dan integrasi dengan berbagai sistem perbankan. Aplikasi ini juga menawarkan fitur-fitur yang memudahkan pengguna untuk melacak status kendaraan dan kewajiban perpajakan mereka.

Sumber: Kemenko Perekonomian. Data Diolah. 2025.

Program-program unggulan ETPD ini menunjukkan potensi transformatif dari inovasi digital dalam pengelolaan keuangan Pemda. Program-program unggulan ETPD ini berbagi faktor keberhasilan yang sama: integrasi dengan sistem yang ada, kemitraan strategis dengan institusi lokal, aksesibilitas bagi warga tanpa memandang lokasi geografis, dan mekanisme transaksi yang aman. Efektivitas mereka menggarisbawahi pentingnya adaptasi kontekstual dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam implementasi ETPD.

### 3.3. Model Inovasi Manajemen ETPD untuk Penguatan Ekonomi Digital Daerah

Berdasarkan analisis terhadap implementasi ETPD di berbagai daerah dan studi kasus program unggulan, dapat diidentifikasi model inovasi manajemen ETPD yang efektif dalam memperkuat ekonomi digital daerah. Model ini terdiri dari empat pilar utama yang diuraikan dalam [Tabel 2](#).

Tabel 2. Model Inovasi Manajemen ETPD dalam Penguatan Ekonomi Digital Daerah

Pilar	Cakupan Tindakan
1. Penguatan Regulasi dan Koordinasi Antarlembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan Perda tentang PDRD yang mengakomodasi ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP No. 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD.</li> <li>Penerbitan Perkada tentang Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai instrumen pembayaran elektronik.</li> <li>Koordinasi antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota dalam implementasi Opsen PKB dan BBNKB.</li> <li>Koordinasi dengan perbankan, khususnya BPD, untuk menyiapkan sistem penyetoran dan <i>split payment</i>.</li> </ol>
Hasil Rakornas P2DD (23 September 2024) menekankan pentingnya Pemda menerbitkan Perda PDRD dan Perkada KKI, serta memperkuat <i>Roadmap</i> P2DD untuk mengakomodasi PP Nomor 35 Tahun 2023.	
2. Penguatan Ekosistem Digital Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Inovasi pemungutan PDRD dengan memanfaatkan teknologi digital.</li> <li>Implementasi Sinergi Bagan Akun Standar (BAS) yang terintegrasi baik secara vertikal (Pusat sampai Desa) maupun antarsistem.</li> <li>Pemanfaatan data bersama di Pusat untuk meningkatkan <i>Local Taxing Power</i>.</li> <li>Penyediaan kanal-kanal pembayaran non-tunai untuk memudahkan masyarakat membayar PDRD.</li> <li>Integrasi layanan SP2D Online dengan sistem perbankan.</li> </ol>
Implementasi ekosistem digital Pemerintah & Pemda yang terintegrasi memungkinkan aliran data dan informasi yang lancar antara berbagai sistem pemerintahan, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.	
3. Pengembangan Infrastruktur Digital	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan PSN Satelit SATRIA untuk mendukung konektivitas di daerah 3T.</li> <li>Pengembangan infrastruktur telekomunikasi, termasuk jaringan <i>fiber optic</i> dan <i>low earth orbit satellite</i>.</li> <li>Peningkatan ketersediaan sinyal 4G di seluruh wilayah Indonesia.</li> </ol>

Pilar	Cakupan Tindakan
Data menunjukkan bahwa cakupan sinyal 4G di Indonesia masih belum merata, dengan wilayah Papua memiliki cakupan terendah sekitar 21,40% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan infrastruktur digital, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).	
4. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan kanal pembayaran digital.</li> <li>Pelatihan tentang keamanan transaksi elektronik.</li> <li>Pendampingan kepada UMKM dalam mengadopsi teknologi digital.</li> <li>Kampanye publik tentang manfaat transaksi non-tunai.</li> </ol>
Peningkatan literasi digital masyarakat merupakan faktor penting dalam mendorong adopsi ETPD. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi digital akan lebih cenderung menggunakan kanal pembayaran digital untuk transaksi keuangan mereka.	

Sumber: Hasil Analisis. Data Diolah. 2025.

Menyimak **Tabel 2**, Model Inovasi Manajemen ETPD terdiri atas empat pilar sebagaimana konsep inovasi pemerintahan yang menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mengembangkan ekosistem inovasi. Pilar penguatan regulasi dan koordinasi mencerminkan pentingnya aspek kelembagaan dalam inovasi pemerintahan. Hal ini dapat dimaknai bahwa kejelasan regulasi dan konsistensi dalam pengimplementasiannya menjadi faktor penentu kepatuhan wajib pajak. Pilar ini juga sejalan dengan rekomendasi Hasil Rakornas P2DD yang menekankan pentingnya penerbitan Perda PDRD dan Perkada KKI oleh Pemda (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024).

Pilar penguatan ekosistem digital Pemerintah sejalan dengan konsep transformasi digital pemerintahan. Secara praktis, Implementasi Sinergi BAS dan integrasi layanan SP2D Online mencerminkan pentingnya interoperabilitas antarsistem dalam transformasi digital yang menekankan integrasi dan koordinasi antarlembaga Pemerintah. Pilar pengembangan infrastruktur digital mencerminkan pentingnya fondasi teknologi dalam transformasi digital. Tidak dapat dipungkiri, teknologi digital berperan mendukung konektivitas di daerah 3T dan perbatasan dalam mengatasi kesenjangan digital sehingga Pemda mampu meningkatkan kinerja keuangan daerahnya. Pada akhirnya, pilar peningkatan literasi digital masyarakat menjadi keniscayaan untuk mengubah sikap dan perilaku pengguna dalam adopsi teknologi digital. Karenanya, sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan kanal pembayaran digital merupakan upaya strategis untuk mengatasi hambatan perilaku dalam adopsi teknologi, yang diidentifikasi sebagai salah satu tantangan dalam transformasi digital.

### 3.4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi ETPD

Berdasarkan analisis terhadap implementasi ETPD di berbagai daerah, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang bersifat dominan dan memengaruhi efektivitas implementasi ETPD dalam konteks hubungan keuangan pusat-daerah. Penjelasan selengkapnya disajikan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Faktor Dominan dalam Implementasi ETPD

No.	Faktor Berpengaruh	Penjelasan
1	Kepemimpinan & Komitmen Politik	Kepemimpinan yang kuat dan komitmen politik dari kepala daerah merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi ETPD. Daerah-daerah dengan capaian ETPD tinggi umumnya memiliki kepala daerah yang memberikan dukungan penuh terhadap transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan temuan <b>Tulungen dkk. (2022)</b> yang menyoroti pentingnya kepemimpinan dalam transformasi digital pemerintahan.
2	Regulasi dan Payung Hukum	Ketersediaan regulasi dan payung hukum yang memadai, baik di tingkat pusat maupun daerah, memengaruhi efektivitas implementasi ETPD. Pemetaan kesiapan pemda menunjukkan bahwa dari 31 provinsi responden, seluruhnya telah menyiapkan Perkada terkait ETPD, dengan 5 provinsi telah menetapkan Perkada dan 7 provinsi menargetkan penerbitan Perkada pada akhir tahun (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesadaran tentang pentingnya payung hukum dalam implementasi ETPD.
3	Kesiapan Infrastruktur Teknologi	Ketersediaan infrastruktur teknologi, termasuk jaringan telekomunikasi dan sistem informasi, memengaruhi efektivitas implementasi ETPD. Wilayah dengan infrastruktur teknologi yang memadai cenderung memiliki capaian ETPD yang lebih tinggi. Peta sebaran cakupan sinyal 4G menunjukkan masih adanya kesenjangan antar wilayah, dengan wilayah Papua memiliki cakupan terendah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024). Kondisi ini menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur digital, khususnya di daerah 3T.

No.	Faktor Berpengaruh	Penjelasan
4	Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Kapasitas SDM, baik di pemerintahan maupun masyarakat, memengaruhi efektivitas implementasi ETPD. Pemerintah daerah dengan SDM yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam teknologi digital cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan ETPD. Hal ini sejalan dengan temuan <a href="#">Sunardi dkk. (2022)</a> yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui model <i>knowledge management</i> .
5	Kemitraan dengan Perbankan	Kerja sama dengan perbankan, khususnya BPD, merupakan faktor penting dalam implementasi ETPD. Pemetaan kesiapan perbankan menunjukkan bahwa dari 26 BPD responden, 25 BPD telah siap melakukan <i>split payment</i> untuk implementasi Opsen PKB ( <a href="#">Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024</a> ). Namun, beberapa kendala masih dihadapi, termasuk sistem/aplikasi yang belum tersedia, kurangnya sosialisasi dan koordinasi dari pemda, serta belum tersedianya regulasi/juknis dari pemda.
6	Literasi Digital Masyarakat	Tingkat literasi digital masyarakat memengaruhi adopsi kanal pembayaran digital dalam transaksi keuangan dengan pemerintah daerah. Masyarakat dengan literasi digital yang tinggi cenderung lebih bersedia menggunakan kanal pembayaran digital. Hal ini sejalan dengan temuan <a href="#">Rusli dan Munari (2022)</a> yang mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan dompet digital.
7	Koordinasi Antar Lembaga	Koordinasi yang efektif antara Pemerintah, Pemda, perbankan, dan lembaga terkait lainnya memengaruhi keberhasilan implementasi ETPD. Pemetaan kesiapan pemda menunjukkan bahwa dari 31 provinsi responden, 3 provinsi belum melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dan 5 provinsi belum melakukan koordinasi dengan pihak perbankan ( <a href="#">Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024</a> ). Kondisi ini menunjukkan masih adanya ruang untuk peningkatan koordinasi antar lembaga dalam implementasi ETPD.
8	Insentif Fiskal	Ketersediaan insentif fiskal bagi Pemda yang berhasil mengimplementasikan ETPD menjadi faktor pendorong. Hasil Rakornas P2DD (23 September 2024) menyoroti pentingnya realisasi tambahan insentif fiskal untuk pemda yang dinilai berhasil dalam mendorong ETPD dan kebijakan P2DD ( <a href="#">Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024</a> ).

Sumber: Hasil Analisis. Data Diolah. 2025.

Memerhatikan [Tabel 3](#), keberhasilan implementasi ETPD bergantung pada beberapa faktor yang saling terkait. Kepemimpinan dan komitmen politik berfungsi sebagai pendorong fundamental, menciptakan momentum yang diperlukan untuk inisiatif transformasi digital. Upaya-upaya ini harus didukung oleh kerangka regulasi yang jelas, infrastruktur teknologi yang kuat, dan SDM yang memadai untuk memastikan pelaksanaan yang efektif. Temuan menunjukkan bahwa kemitraan dengan institusi perbankan, khususnya BPD, memainkan peran penting dalam memfasilitasi transaksi elektronik, sementara koordinasi antarlembaga memastikan implementasi yang koheren di seluruh tingkat pemerintahan. Selain itu, insentif fiskal memberikan motivasi nyata bagi Pemda untuk mempercepat adopsi ETPD. Faktor-faktor ini secara kolektif menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pengembangan ekosistem digital, dengan literasi digital berfungsi sebagai jembatan antara kemampuan teknologi dan pemanfaatan publik yang sebenarnya, yang pada akhirnya menentukan keberhasilan ETPD dalam memperkuat sistem ekonomi daerah.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi ETPD di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa inovasi manajemen ETPD berperan strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital pemerintahan daerah. Model inovasi manajemen ETPD yang efektif terdiri dari empat pilar utama, yakni: penguatan regulasi dan koordinasi antarlembaga, penguatan ekosistem digital Pemerintah, pengembangan infrastruktur digital, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Implementasi ETPD telah menunjukkan tren positif, namun masih terdapat kesenjangan antarwilayah, dengan capaian tertinggi Jawa-Bali dan Nusampua terendah.

Efektivitas implementasi ETPD dipengaruhi oleh delapan faktor dominan: kepemimpinan dan komitmen politik, regulasi dan payung hukum, kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas SDM, kemitraan dengan perbankan, literasi digital masyarakat, koordinasi antarlembaga, dan insentif fiskal. Program-program unggulan ETPD seperti Program Jateng Gayeng, Samsat Digital Jawa Barat, dan aplikasi SIGNAL menunjukkan bahwa inovasi manajemen dalam implementasi ETPD dapat meningkatkan penerimaan daerah dan memperkuat ekosistem digital.

Inovasi manajemen ETPD tidak hanya memperkuat tata kelola keuangan daerah, tetapi juga mempercepat akselerasi ekonomi daerah melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah. Integrasi teknologi digital dengan jaringan masyarakat melalui BUMDes dalam Program Jateng Gayeng, pengembangan sistem yang *user-friendly* dalam SDJB, dan integrasi dengan berbagai kanal pembayaran digital dalam aplikasi SIGNAL merupakan contoh nyata inovasi manajemen yang berhasil mengoptimalkan implementasi ETPD. Kesuksesan implementasi ETPD memerlukan komitmen politik yang kuat, regulasi yang mendukung, infrastruktur teknologi yang memadai, SDM yang kompeten, dan literasi digital masyarakat yang meningkat, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam kerangka hubungan keuangan pusat-daerah yang harmonis.

Beberapa kendala memengaruhi implementasi ETPD di berbagai daerah Indonesia yang beragam. Kesenjangan infrastruktur digital tetap signifikan, dengan Papua hanya memiliki cakupan jaringan 4G sebesar 21,40% dibandingkan dengan cakupan hampir lengkap di Jawa-Bali. Kapasitas sumber daya manusia bervariasi secara substansial antar daerah, dengan banyak pemerintah daerah kekurangan personel dengan kompetensi digital. Implementasi lebih lanjut berupa literasi digital masyarakat yang terbatas, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Harmonisasi regulasi antara peraturan pusat dan daerah menghadirkan tantangan berkelanjutan, terutama mengenai penyelarasan peraturan pajak daerah dengan PP No. 35 Tahun 2023. Selain itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap tidak konsisten, dengan data menunjukkan bahwa 3 dari 31 provinsi yang disurvei belum membangun koordinasi dengan kabupaten/kota dalam implementasi ETPD.

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan beberapa hal berikut: (1) Memperkuat kemitraan antarlembaga antara instansi Pemerintah, Pemda, sektor perbankan, dan entitas swasta melalui mekanisme koordinasi formal; (2) Mengembangkan *Roadmap* ETPD yang komprehensif/mengakomodasi PP No. 35 Tahun 2023; (3) Memprioritaskan pengembangan infrastruktur digital di daerah 3T dan Perbatasan melalui investasi yang ditargetkan pada jaringan telekomunikasi; (4) Meningkatkan literasi digital melalui program pendidikan terstruktur yang ditargetkan pada aparatur Pemerintah dan masyarakat, misalnya bagi pejabat atau aparatur pemerintah literasi digital mencakup pemahaman teknis terkait penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) ataupun aplikasi terkait dengan digitalisasi sistem keuangan pemerintah yang dikemas melalui bimtek baik daring maupun luring, sedangkan bagi masyarakat umum khususnya pelaku UMKM dan wajib pajak daerah, literasi diarahkan pada pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan kanal pembayaran digital maupun akses terhadap platform belanja pemerintah; (5) Menetapkan pedoman implementasi teknis bagi Pemda untuk memfasilitasi implementasi ETPD yang seragam; (6) Mengembangkan sistem pembayaran digital terintegrasi yang mendukung berbagai kanal transaksi elektronik; dan (7) Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas ETPD dan mengidentifikasi area untuk perbaikan berkelanjutan.

#### Referensi

- Aisyah, & Nurohman, Y. A. (2023). *Pengaruh Kemudahan, Kemanfaatan, Risiko, dan Keamanan Terhadap Keputusan Penggunaan E-Wallet pada Generasi Milenial di Wonogiri* [Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta]. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/3122>
- Alya, B. Z., Hanum, F., Nasirwan, Hasan, S., & Wahyuni, D. U. (2024). Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kota Medan). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 7. <https://ejournal.pkmpi.org/index.php/ijess/article/view/56>
- Amalia, M., Muttakin, M. Z., Akbar, M. F., Kurniawan, H., Sobandi R. M., A., Dinata, F. P., Naufal F., M. M., & Mahesa, W. A. (2025). Analisis Yuridis Kepatuhan Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Daerah di

- Wilayah Cianjur Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 1–9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3677>
- Aminah, S., & Saksono, H. (2021). Digital Transformation of the Government: A Case Study in Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 37(2), 272–288. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3702-17>
- Ananda, M. A. (2022). Elektronifikasi Transaksi Pembayaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Bisnis STIAPEN*, 1(1), 38–48. <https://ejournal.stiapennaganraya.ac.id/index.php/jab/article/view/5>
- Aringga, P. A. (2023). Implementasi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dalam Pengembangan Financial Technology di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan [Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary]. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/9082>
- Artha, N. P. M. (2021). *ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah)*. Deepublish.
- Astuti, W. K., & Arifin, M. R. (2023). Analisis Pengaruh Kemudahan, Manfaat dan Fitur Layanan Fintech Payment Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Surakarta) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta]. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/7807>
- Barinova, V. A., & Zemtsov, S. P. (2020). Inclusive Growth and Regional Sustainability of Russia. *Regional Research of Russia*, 10(1), 10–19. <https://doi.org/10.1134/S2079970520010025>
- Birkinshaw, J., Hamel, G., & Mol, M. J. (2008). Management Innovation. *Academy of Management Review*, 33(4), 825–845. <https://doi.org/10.5465/amr.2008.34421969>
- Bowo, F. A. (2022). Peran E-Commerce dan Strategi Promosi Ditinjau dari Kebijakan Klustering UMKM di Era Digital. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(1), 59–74. <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/73>
- Chasanah, N., & Muharrami, R. S. (2023). Pengaruh Iklan, Persepsi Kemudahan dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Masyarakat dalam Menggunakan Aplikasi Dompot Digital Linkaja Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Kabupaten Sukoharjo) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta]. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/8503>
- Damayanti, E. T. (2024). Evaluasi Progam Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD): Studi Kasus Upaya Peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Solo Raya.
- Fadhilah, A., & Herawati, N. R. (2023). Evaluasi Program E-Retribusi Pasar di Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/41309>
- Fahrinda, Y., Giyanto, B., & Asropi. (2024). Strategi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Tangerang. Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024, September 23). *Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. [https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5974/akselerasi-pertumbuhan-ekonomi-daerah-melalui-optimalisasi-digitalisasi-transaksi-pemerintah-daerah?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5974/akselerasi-pertumbuhan-ekonomi-daerah-melalui-optimalisasi-digitalisasi-transaksi-pemerintah-daerah?utm_source=chatgpt.com)
- Nukpezah, J., Abutabenjeh, S., & Azhar, A. (2022). Do Smart Cities Technologies Contribute to Revenue Performance? Evidence from U.S. Local Governments. *Public Performance & Management Review*, 45(5), 1155–1180. <https://doi.org/10.1080/15309576.2022.2076248>
- Pardede, L. E. Y. (2022). Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2021.
- Prianto, A. H. A., Asri, H. U., & Sari, F. A. (2021). Merdeka Digitalisasi: Optimalisasi UMKM dengan Metode Self Approach Guna Mengentaskan Keterpurukan Ekonomi Sebagai Resultan Pandemi COVID-19. *Inspire Journal: Economics and Development Analysis*, 1(2), 157–172. <https://ejournal.uksw.edu/inspire/article/view/7340>
- Rusli, G. E., & Munari, M. (2022). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Dompot Digital. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(2), 640–665. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.2080>
- Saifuddin, R. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 8(2), 192. <https://doi.org/10.35450/jip.v8i02.198>
- Saksono, H. (2018). Kelurahan Silalas Sebagai Innovation Hub: Strategi Kompetitif Pemerintah Kota Medan Melalui Perangkat Kewilayahannya. *Inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan*, 15(2), 105–124. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v15i2.77>

- Saksono, H. (2019). Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Penelitian & Pengembangan dan Desain & Inovasi. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 213–226. <https://jkjournal.com/index.php/menu/article/view/36>
- Saksono, H. (2020). Innovation Hub: Media Kolaborasi Menuju Pemerintahan Daerah Inovatif. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(1), 1–16. <https://doi.org/10.35967/JIPN.V19I1.7854>
- Saksono, H. (2023). Inovasi MALAPEAKA: Upaya Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik di Kelurahan Bone-Bone, Kota Baubau. *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.46891/kainawa.5.2023.1-15>
- Saksono, H. (2024). Dodeca-Helix: Pentingnya Mengintegrasikan 12 Dimensi Pemangku Kepentingan untuk Menumbuhkan Ekosistem Inovasi di Kota Baubau. *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya*, 6(1), 51–63. <https://doi.org/10.46891/kainawa.6.2024.51-63>
- Sherenita, I., & Huseno, T. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis Non Tunai di Kota Tarakan. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17998>
- Sudrajat, Y., & Kristian, I. (2022). Implementasi Aplikasi E-Retribusi di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang. *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(2), 116–127. <https://doi.org/10.15575/jim.v3i2.23138>
- Sunardi, Djazuli, A., Handayani, R. D., Hidayat, B. A., & Saksono, H. (2022). The Role of Human Development in Improving Local Government Performance Through Good Government Governance. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 571–582. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.571-582>
- Tulungen, E. E. W., Saerang, D. P. E., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi Digital: Peran Kepemimpinan Digital. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(2), 1116–1123. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41399>
- Zahra, R. (2024). Pengaruh Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Upaya untuk Mengukur Tingkat Literasi Keuangan di Provinsi Lampung. *Kyberology: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 2(1), 119–138. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kyberology/article/view/102>